

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Prabu Anom Maulana Sudiro Atmojo

NPP. 31.0380

Asdaf Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Kebijakan Publik

Email: prabuanommaulanasa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Serly Wulandari, S.IP., M.Tr.I.P

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Waste management is very important to help the government overcome the waste problem in Indonesia. This includes Bekasi City with the issuance of Bekasi City Regional Regulation Number 02 of 2021 concerning the Second Amendment to Regional Regulation Number 15 of 2011 concerning Waste Management. However, in its implementation there are still problems such as people throwing rubbish out of place. **Objective:** This research aims to describe the implementation of Waste Management policies in Bekasi City, identify inhibiting factors and analyze the efforts made by the Environmental Service in optimizing Waste Management in Bekasi City. **Method:** The method used in this research is a descriptive qualitative research approach. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data display and verification. The technique for determining informants is purposive sampling and snowball sampling. The theory used is Policy Implementation according to Van Meter and Van Horn (1975) with 6 (six) dimensions. **Results/Findings:** The research results show that the implementation of waste management policies by the Environmental Service in Bekasi City has not been running optimally. In the dimensions of standards and policy targets, there are still many people who throw away waste inappropriately and there is a lack of community participation in participating in socialization on waste management. In the Human Resources Dimension, there are no incentives provided by the government as rewards to motivate the community in waste management. Dimensions of Characteristics of the Implementing Organization, the implementation of Bekasi Mayor Regulation Number 65 of 2018 has not been optimal. Dimensions of Implementing Attitudes, the commitment of the Bekasi City Environmental Service is characterized by socialization carried out periodically in all areas of Bekasi City. Inter-Organizational Communication Dimensions, minimal communication with the public who prioritize personal activities. Dimensions of Social Environmental Conditions, there is still a minimal budget provided by the government for waste management in Bekasi City.

Conclusion: *The results of the research show that the implementation of waste management policies by the Environmental Service in Bekasi City has not been running optimally.*

Keywords : *Policy Implementation, Waste Management, Government*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan sampah sangat penting untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Termasuk halnya di Kota Bekasi dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih ada permasalahan seperti masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi, mengetahui faktor penghambat serta menganalisis upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengoptimalkan Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara data *reduction*, data *display* dan *verification*. Teknik penentuan informan dengan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teori yang digunakan adalah Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dengan 6 (enam) dimensi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi belum berjalan dengan optimal. Pada dimensi standar dan sasaran kebijakan, masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi pengelolaan sampah. Dimensi Sumber Daya Manusia, belum ada insentif yang diberikan pemerintah sebagai *reward* guna memotivasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dimensi Karakteristik Organisasi Pelaksana, belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2018. Dimensi Sikap Pelaksana, komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ditandai dengan sosialisasi yang dilakukan secara berkala pada seluruh wilayah Kota Bekasi. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi, minim komunikasi dengan masyarakat yang lebih mementingkan aktivitas pribadi. Dimensi Kondisi Lingkungan Sosial, masih minimnya anggaran yang di sediakan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi belum berjalan dengan optimal

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Pemerintah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah yang tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi mencemari lingkungan, merusak nilai estetika dan pariwisata lokal serta polusi udara jika terdapat banyaknya sampah yang menumpuk (merdeka.com, 2023). Penanganan sampah menjadi semakin kompleks dan rumit dengan banyaknya aktivitas penduduk, termasuk halnya yang dialami oleh Kota Bekasi sebagai salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi sebagai salah satu Kota dari 9 Kota dan 18 Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat (jabarprov.go.id, 2023). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah yang memiliki tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, mengolah sampah menjadi sumber daya, menggunakan bahan baku secara lebih efisien dan mengubah perilaku untuk semua.

Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Kota Bekasi Harus mengoptimalkan Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 14 yaitu:

Dalam rangka kegiatan pengurangan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atas kemasan produk, antara lain dalam bentuk pencantuman label pada produk dan/atas kemasan produk yang dihasilkan dan terurai oleh proses alam; dan/ atau dapat didaur ulang.

1.2 GAP Penelitian

Kota Bekasi juga menjadi daerah yang memiliki jumlah sampah terbanyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah data jumlah sampah beberapa daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Setiap harinya Kota Bekasi menghasilkan volume sampah sebanyak 1,830.63 ton/hari dan dalam jangka waktu per tahun volume sampah yang di hasilkan Kota Bekasi mencapai 668,179.00 ton/tahun. Kota Bekasi memiliki Tempat Pembuangan Akhir berlokasi di Jl. Pangkalan II, No. 108, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, yang memiliki luas lahan 22.00 hektar dan luas *landfill* aktif 107,00.00 m² (sipsn.menlhk.go.id, 2023). Tempat Pembuangan Akhir Sumur Batu hanya bisa menampung 70% sampah yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah truk pengangkut sampah yang dimiliki oleh Pemkot Bekasi, sehingga sekitar 30% sampah yang tidak terangkut menimbulkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar Fakhri Fadlurrohman (2022).

Kota Bekasi menjadi urutan kedua setelah Kabupaten Bekasi yang menjadi urutan pertama dalam permasalahan sampah, jumlah volume sampah yang dimiliki Kota Bekasi pada tahun 2022 berjumlah 668,179.00 ton. Dapat di ketahui bahwa dari tahun 2022 Kota Bekasi (sipsn.menlhk.go.id, 2023). Salah satu faktor yang membuat bertambahnya volume sampah di Kota Bekasi karena banyaknya pabrik-pabrik industri di Kota Bekasi. Penyebab terjadinya permasalahan sampah

dikarenakan sampah yang terus menumpuk dan tidak diimbangi dengan pengelolaan yang benar maka akan menyebabkan berbagai permasalahan dari segi kesehatan hingga segi polusi udara. Untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, Pemerintahan Kota Bekasi telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Perubahannya berkaitan pada Pasal (1) yaitu :

Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat BLPS) adalah sistem pengeluaran berdasarkan anggaran pengelolaan sampah setempat berdasarkan jumlah yang dikelola per ton, dan disisipkan satu pasal di antara Pasal 47C dan Pasal 48. Pasal 47D (1) Kota Bekasi setiap tahun menyelenggarakan BLPS melalui Anggaran Pendapatan Daerah untuk Pengelolaan Persampahan (APBD). (2) BLPS merupakan pelayanan pembuangan sampah yang disepakati secara cuma-cuma untuk pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan dan perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembanding yang digunakan bisa mulai dari subjek, objek, teori yang digunakan, alat analisis data, bahkan jenis dan metode penelitian yang digunakan. Maka ada beberapa penelitian terdahulu terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis. Artikel yang ditulis oleh Ricky Muliawan Hansyar dan Halimah yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Pengelolaan Sampah di Sigli Kabupaten Pidie (Ricky Muliawan Hansyar, 2022) menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan. (Ibrahim, 2020) menyebutkan sampah bukan hanya menjadi isu lingkungan saja, tetapi sudah menjadi isu multidimensi karena apabila pengelolaan sampah ini tidak baik maka akan menyebabkan bencana banjir, mewabahnya penyakit cikungunya, demam berdarah *dengeu* (DBD) dan lain sebagainya. Penelitian Bella et al., menyebutkan mengelola sampah di perkotaan dapat dikatakan terbilang sulit dan memiliki banyak tantangan dalam pengelolaannya. Tujuan penelitian yakni ingin mengetahui apa saja faktor yang menghambat implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah. Penelitian selanjutnya Abdul dan David 2020 Berdasarkan hasil penelitian diketahui pemerintah setempat belum melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah kepada masyarakat secara masif. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi hanya sebagai formalitas saja, karena tidak ada tindak lanjut dari kegiatan monitoring. Terakhir, penelitian ini terinspirasi dari artikel yang di tulis Susanti, Ronny dan Ventje 2022, terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya,

penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Analisis yang digunakan berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ricky dan Halimah, Ibrahim, Bella, Faizal dan Titi, Abdul dan David, Susanti, Ronny dan Ventje, Dimana penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat secara menyeluruh berdasarkan enam dimensi, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, sikap Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan kegiatan-Kegiatan Pelaksana, dan Kondisi Lingkungan Sosial, ekonomi, dan Politik.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah, faktor penghambat keberhasilan serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penulis menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode untuk mendalami serta mengerti makna bagi beberapa individu atau kelompok berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Fokus utama dalam penelitian kualitatif yaitu mampu memahami, menjelaskan, menggali, menemukan dan mengklarifikasi situasi, perasaan, persepsi, sikap, nilai, keyakinan dan pengalaman sekelompok orang Creswell & Clark (2018). Menurut Creswell (2017) tujuan penggunaan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah bahwa suatu masalah atau subjek permasalahan yang ingin diselidiki perlu untuk dieksplorasi secara terperinci, detail, dan tidak dapat ditransformasikan dalam bentuk statistik, seperti interaksi antar individu dan keterkaitannya dengan konteks dan pandangan yang dimiliki oleh partisipan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 13 orang informan yang ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, (1975) yang terdiri dari enam dimensi, yaitu dimensi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya manusia, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Implementasi Kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik

secara individu atau per kelompok demi mencapai suatu tujuan. Penelitian ini menganalisis pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan menggunakan fakta-fakta yang telah penulis dapatkan di lapangan baik menggunakan metode wawancara dengan menunjuk beberapa masyarakat ataupun pejabat-pejabat daerah yang telah dipercaya sebagai informan untuk mendukung suatu kebenaran di lapangan, maupun metode observasi dan dokumentasi. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yang telah penulis tentukan dengan menggunakan operasional konsep pada BAB sebelumnya, terdapat beberapa tahapan yang telah ditentukan sebagai tolak ukur sejauh mana Implementasi Kebijakan tersebut telah berjalan sebagaimana penulis akan jelaskan pada beberapa pembahasan sebagai berikut.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Pada kondisi awal ini dilakukan penyempitan yang menjadi dua indikator yaitu, standar kebijakan dalam implementasi pengelolaan sampah dan tinjauan dalam menentukan kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1975). Adapun dua indikator tersebut yang akan di jelaskan dengan menggunakan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

a. Standar kebijakan dalam implementasi pengelolaan sampah

Indikator ini menunjukkan seberapa besarnya kebijakan dalam mempengaruhi kebijakan implementasi pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu. Permasalahan volume sampah yang sedang terjadi oleh karena itu Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintahan Kota Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan indikator ini penulis juga menganalisis mengenai situasi di daerah sekitar TPA Sumur Batu kurangnya kesadaran dan kurangnya sosialisasi pemerintah Kota Bekasi mengenai pengelolaan sampah yang dimana masyarakat tidak memiliki daya tarik untuk bekerja sama dengan pemerintah. Yang dimana permasalahan ini persoalan volume sampah yang belum optimal dalam penurunannya di Kota Bekasi dan belum optimalnya dalam pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu Kota Bekasi

Penurunan jumlah volume sampah di Kota Bekasi bisa dilihat berdasarkan tabel 4.3 yang telah penulis dapatkan di lapangan akan tetapi itu hanya jumlah volume sampah yang di dapat per setiap tahunnya bukan jumlah volume sampah yang masih tertimbun di TPA Sumur Batu.

Tabel 4.

Volume Sampah di TPA Sumur Batu

No.	Wilayah	2022	2023
1.	Kota Bekasi	668,179.00	510,784.00

Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2024)

Berdasarkan tabel 4. bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang telah di

atur oleh Pemerintah Kota Bekasi sangatlah berpengaruh dalam menekankan penurunan jumlah volume sampah. Akan tetapi jumlah volume sampah yang sudah tertimbun belum dapat diatasi karena jumlah sampah yang tertimbun tidak terdata dan juga masih belum ada kebijakan dalam mengurangi sampah yang sudah tertimbun di TPA Sumur Batu.

b. Tinjauan dalam menentukan kebijakan pengelolaan sampah

Pemerintah Kota Bekasi telah memperhitungkan kebijakan apa yang relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Penulis lakukan dengan mengaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn yang penulis gunakan maka dapat disimpulkan bahwa kurang optimalnya dalam penerapan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah yang mengakibatkan masih kurangnya dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, karena masih ada sampah yang di buang sembarangan dan tidak terangkut oleh petugas yang berada di lapangan hal ini juga masih menjadi kendala dalam pengelolaan sampah secara optimal.

2. Sumber Daya

a. Insentif yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup

Belum adanya insentif sebagai penyemangat atau sebagai motivasi para pelaksana dalam menjalankan perintah yang diberikan apabila tugas dan tanggung jawab tersebut telah dijalankan dengan baik. Pada dasarnya insentif sangat diperlukan dalam memotivasi dan meningkatkan ke ikut sertaan masyarakat dalam peduli kepada lingkungan dengan pengelolaan sampah, tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang insentif diberlakukan sehingga bisa mengurangi jumlah volume sampah yang ada di Kota Bekasi.

b. Sumber daya manusia yang memadai

Kota Bekasi memiliki sumber daya manusia yang mencukupi akan tetapi kurang optimalnya dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang ada hal ini didukung dengan jumlah penduduk Kota Bekasi memiliki penduduk berjumlah 2.513.699 juta jiwa. Terdiri dari laki-laki berjumlah 1.257.169 juta jiwa dan perempuan dengan jumlah 1.256.500 juta jiwa. (Disdukcapil Kota Bekasi, 2024). Minimnya partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan dan pengurangan sampah. Kultur yang ada di lingkungan Kota Bekasi sangat berpengaruh untuk membentuk jiwa kepedulian masyarakat.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

a. Pembuatan SOP

Peraturan pelaksanaan merupakan pedoman bagi para pelaksana suatu

kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan agar sesuai dengan maksud dan tujuan dari tujuan kebijakan tersebut. SOP yang ada belum sepenuhnya mampu di implementasikan oleh pemerintah Kota Bekasi, karena terkendala dengan fakta yang ada di lapangan oleh karena itu pemerintah Kota Bekasi masih berupaya untuk mengoptimalkan peraturan yang ada untuk segala di implementasikan agar masalah pengelolaan sampah ini dapat di selesaikan dan tidak menjadi masalah yang berkepanjangan kedepannya.

b. Diskresi

Pemerintah Kota Bekasi berpedoman dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bertujuan untuk mengurangi jumlah volume sampah dan pengelolaan sampah dengan pemanfaatan ulang sampah. Dengan ini Pemerintah Kota Bekasi bergerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah yang ada, pemerintah Kota Bekasi mengharapkan agar dapat di optimalkan peraturan yang telah dikeluarkan dan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Kota bebas dari permasalahan sampah.

4. Sikap Pelaksana

a. Komitmen

Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus melakukan pengoptimalan pengelolaan sampah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi berkomitmen untuk melakukan sosialisasi ke setiap wilayah yang ada di Kota Bekasi demi mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan terutama pada sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang menjadi permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bekasi.

b. Ketersediaan infrastruktur teknologi

ketersediaan infrastruktur teknis menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Kurang nya teknologi dalam pengelolaan sampah sehingga sampah yang sudah tertimbun tidak dapat dikelola dengan optimal, meskipun pemerintah tidak bisa menangani pengelolaan sampah sendirian. Jika terus berlanjut, perluasan TPA Sumur Batu akan membuat masyarakat yang tinggal di sekitar TPA berisiko masuk zona merah.

5. Komunikasi antar Organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

a. Koordinasi antar organisasi terkait pengelolaan sampah

Koordinasi antar organisasi sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan dan keberhasilan dalam menghadapi suatu persoalan ataupun lainnya. Karena koordinasi menyatu padukan suatu tujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi jarang sekali melakukan

koordinasi antar organisasi hal ini yang menyebabkan belum optimalnya dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Bekasi.

b. Koordinasi dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah

Koordinasi dengan masyarakat sangat diperlukan dimulai dari perangkat masyarakat seperti RT/RW dan sebagainya hingga mencapai keseluruhan akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi belum dapat melakukan hal itu dikarenakan banyak masyarakat dan perangkat RT/RW yang ada dimasyarakat belum bisa hadir sehingga belum optimalnya koordinasi dengan masyarakat dan RT/RW. Masih sulitnya masyarakat untuk diajak bekerja sama dalam pengelolaan sampah karena beranggapan tidak ada hal yang menguntungkan untuk masyarakat apabila ikut serta dalam pengelolaan sampah, oleh karena itu pemerintah masih berupaya untuk memberikan suatu hadiah atau imbalan apabila masyarakat mampu dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Bekasi.

6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

a. Kondisi lingkup sosial

Kondisi lingkungan sosial di Kota Bekasi belum optimalnya kepedulian masyarakat dengan permasalahan sampah, karena masih ada masyarakat yang gemar membuang sampah sembarangan dan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi apabila terus menerus buang sampah sembarangan seperti pada gambar 4.6 di bawah ini.

Gambar 4.

Kondisi Sampah di Lingkungan Kota Bekasi



Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi,2024)

Berdasarkan gambar diatas masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya membuang sampah sembarangan yang dapat menimbulkan penyakit dan aroma yang kurang sedap. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di dapat dari fakta-fakta lapangan yang ada di atas bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan masih menganggap remeh dampak negatif dari sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, pemerintah Kota Bekasi telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan tetapi minimnya ke ikut sertaan masyarakat forum sosialisasi yang telah disediakan.

b. Dana yang tersedia

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengeluarkan anggaran yang

disediakan oleh pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mengatasi pengelolaan sampah dan kurang optimalnya dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Bekasi karena kurangnya anggaran yang di sediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

3.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Belum ada Insentif yang diberlakukan atau anggaran khusus Pengelolaan Sampah

Banyak masyarakat yang menghiraukan ajakan pemerintah untuk melakukan kolaborasi, karena tidak adanya insentif yang dapat menguntungkan bagi masyarakat hal itu yang menyebabkan masyarakat tidak mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah demi menjaga lingkungan dan mengurangi volume sampah yang ada di Kota Bekasi.

2. Anggaran Pelaksana

Pengelolaan sampah merupakan permasalahan serius di Kota Bekasi, oleh karena itu perlunya pendanaan sampah. Dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup telah memfasilitasi armada pengangkutan sampah dan alat berat yang berada di TPA Sumur Batu, berikut data kendaraan operasional yang beroperasi pada Dinas Lingkungan Hidup tergambar pada Tabel 4.

Tabel 4.
Kendaraan Operasional Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi Tahun 2023

No.	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Bantar Gebang	14
2.	Bekasi Selatan	35
3.	Bekasi Barat	33
4.	Bekasi Timur	26
5.	Bekasi Utara	32
6.	CONTAINER	24
7.	JATI ASIH	21
8.	JATI SAMPURNA	21
9.	MEDAN SATRIA	24
10.	MUSTIKA JAYA	29
11.	PONDOK GEDE	30
12.	PONDOK MELATI	2
13.	PROTOKOL	18
14.	RAWA LUMBU	25
15.	HUTAN KOTA	2

Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2024)

Berdasarkan data pada Tabel 4.5 terlihat bahwa jumlah kendaraan yang beroperasi sebanyak kendaraan dinilai sangat sedikit mengingat Kota Bekasi menghasilkan sampah dalam jumlah besar.

3. Sosialisasi yang belum optimal

Dalam mengoptimalkan kebijakan atau peraturan yang berlaku pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan. Kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat memiliki peranan yang penting karena apabila masyarakat tidak sejalan dengan pemerintah maka kebijakan tersebut maka peraturan tersebut tidak berjalan secara optimal.

4. Program Bank Sampah belum optimal

Bank sampah yang ada di setiap kelurahan Kota Bekasi belum berjalan optimal karena minimnya anggaran dan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam program bank sampah dapat dilihat berdasarkan tabel 4.

Tabel 4.

Data Bank Sampah di Kota Bekasi 2023

No.	Kecamatan	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1.	Bekasi Barat	24	9	15
2.	Bekasi Selatan	34	12	22
3.	Bekasi Timur	29	12	17
4.	Bantar Gebang	9	4	5
5.	Bekasi Utara	64	26	38
6.	Jati Sampurna	12	7	5
7.	Jati Asih	34	14	20
8.	Medan Satria	39	10	29
9.	Mustika Jaya	55	13	42
10.	Pondok Gede	19	7	12
11.	Pondok Melati	23	7	16
12.	Rawa Lumbu	34	11	23
	Jumlah :	376	132	244

Sumber : (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, 2024)

Berdasarkan tabel. 4.7 Kota Bekasi memiliki bank sampah berjumlah keseluruhan 376 dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi terdiri 132 jumlah bank sampah aktif dan 244 jumlah bank sampah yang tidak aktif. Hal ini yang menyebabkan belum optimalnya dalam pengelolaan sampah di Kota Bekasi, pemerintah Kota Bekasi harus segera melakukan evaluasi tentang penyebab bank sampah yang tidak aktif. Belum optimal dalam program bank sampah karena jumlah bank sampah yang aktif hanya sedikit dibandingkan dengan jumlah bank sampah yang tidak aktif hal ini merupakan faktor utama belum optimal dalam bank sampah dan didukung dengan faktor pendukung lainnya yang tidak memadai.

3.3 Upaya Untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Bekasi

Seperti pembahasan sebelumnya tentang Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah yang memiliki beberapa hambatan seperti hanya mengandalkan bank sampah dan TPS3R sebelum masuk nya sampah ke TPA Sumur Batu dan minim nya infrastruktur teknologi dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup memberikan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pemerintah memiliki upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah yaitu:

1. Mengoptimalkan bank sampah

Dengan berkolaborasi dengan teknologi yang dimana hal itu dapat mengurangi jumlah volume sampah dan melakukan kolaborasi dengan masyarakat sekitar sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

2. Mengoptimalkan TPS3R

Dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang ada di Kota Bekasi, dengan memberikan pengetahuan bahaya sampah plastik yang tidak bisa terurai dengan tanah dan juga memberikan pengetahuan sampah rumah tangga dan sejenis nya yang bisa di kelola menjadi suatu produk sehingga memiliki nilai jual dan juga dapat mengurangi sampah yang akan di angkut ke TPA dengan pemilahan sampah yang baik.

3. Menyediakan lokasi

Untuk masyarakat menyalurkan sampah yang sudah di pilah berdasarkan jenis nya dan memberikan sebuah imbalan berupa uang yang dimana per setiap sampah yang di setorkan lalu di timbang berdasarkan beratnya. Sehingga masyarakat memiliki semangat untuk terus mengumpulkan dan memilah sampah yang setiap harinya telah digunakan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa adanya regulasi yang sudah ada dapat mendorong keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi, sedangkan minimnya dana yang tersedia untuk menunjang keberhasilan pengelolaan sampah dan juga minimnya partisipasi masyarakat dalam berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan sampah. Hal ini juga sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Ricky Muliawan Hansyar dan Halimah, yang menyatakan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, salah satu masalah yang timbul adalah masalah sampah yang mengakibatkan terjadinya penambahan volume sampah sehingga berdampak negatif yaitu sampah mengakibatkan lingkungan menjadi kurang bersih dan kurang sehat (Ricky Muliawan Hansyar, 2022). Sebagai rekomendasi yang diberikan oleh penulis berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan bahwa perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah yang dapat dilakukan secara mandiri di Kota Bekasi. Hal ini sejalan dengan temuan analisis Muhammad Ibrahim Sahupala pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya: upaya yang dilaksanakan seperti sosialisasi tentang pengelolaan sampah, upaya peremajaan armada pengangkut sampah, pembahasan Sumber Daya Manusia (SDM), pembahasan TPS, peningkatan keahlian

pegawai dalam pengelolaan sampah, pembinaan petugas pengangkut sampah, berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait (MI Sapuhala, 2020).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan analisis dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) terhadap enam dimensinya. Guna meningkatkan keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, disarankan melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Bekasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dimulai dengan pemilahan sampah dan pengelolaan sampah secara mandiri ataupun secara berskala besar yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, mengajukan dana insentif guna mendorong motivasi masyarakat dalam keikutsertaan pemilahan dan pengelolaan sampah dan juga meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Kota Bekasi. hal ini diharapkan dapat mendorong adanya partisipasi masyarakat dan aktor pemangku kepentingan lebih optimal.

Keterbatasan Penelitian : yakni berupa keyakinan atau pendapat penilitiann yang dapat memengaruhi proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future*) : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat untuk menentukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi, terkhusus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang telah bersedia menerima, memfasilitasi, serta membantu penulis dalam memperoleh data penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Cresswell, J. W., & Clark, P. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. SAGE Publications.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. (2024). *Data Bank Sampah Umum*.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. (2024). *Jumlah Volume Sampah* .

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. (2024). *Volume sampah*.
- Disdukcapil Kota Bekasi. (2024). *Jumlah Penduduk di Kota Bekasi 2023*.
- Fakhri Fadlurrohman. (2022, May 21). *TPA Sumur batu Overload, Pemkot Bekasi Imbau Warga Tak Asal buang Sampah*. Detiknews.
- jabarprov.go.id. (2023). *PORTAL JABARPROVGOID*. PORTAL JABARGOID.
- sipsn.menlhk.go.id. (2023). *Timbulan Sampah*.
<https://Sipsn.Menlhk.Go.Id/Sipsn/Public/Data/Timbulan>.
- John W. Creswell. (2017). *Pendekatan Mode kualitatif, kuantitatif dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- merdeka.com. (n.d.). *Dampak Buang Sampah Sembarangan Bagi Lingkungan*.
- MI, S. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TASIKMALAYA (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398*, 5, 1–9.
- Ricky Muliawan Hansyar, H. H. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI SIGLI KABUPATEN PIDIE. *SAINS RISET*, Vol 12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47647/jsr.v12i1.562>
- sipsn.menlhk.go.id. (2023). *Timbulan Sampah*.
<https://Sipsn.Menlhk.Go.Id/Sipsn/Public/Data/Timbulan>.
- sipsn.menlhk.go.id. (2023). *TPA/TPST*.
<https://Sipsn.Menlhk.Go.Id/Sipsn/Public/Home/Fasilitas/Tpa-Tpst>.
- Van Meter dan Van Horn. (1975). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*.